

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 8 Vol. II. Mei 2017

Meningkatkan Industri Sepatu/Alas Kaki Nasional

p. 03

Permasalahan Urbanisasi di Indonesia

p. 08

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.E.

Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Marihot Nasution, S.E., M.Si

Adhi Prasetyo S. W., S.M.

Editor

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Ade Nurul Aida, S.E.

Daftar Isi

<i>Update APBN</i>	p.02
Meningkatkan Industri Sepatu/Alas Kaki Nasional.....	p.03
Permasalahan Urbanisasi di Indonesia.....	p.08

Update APBN

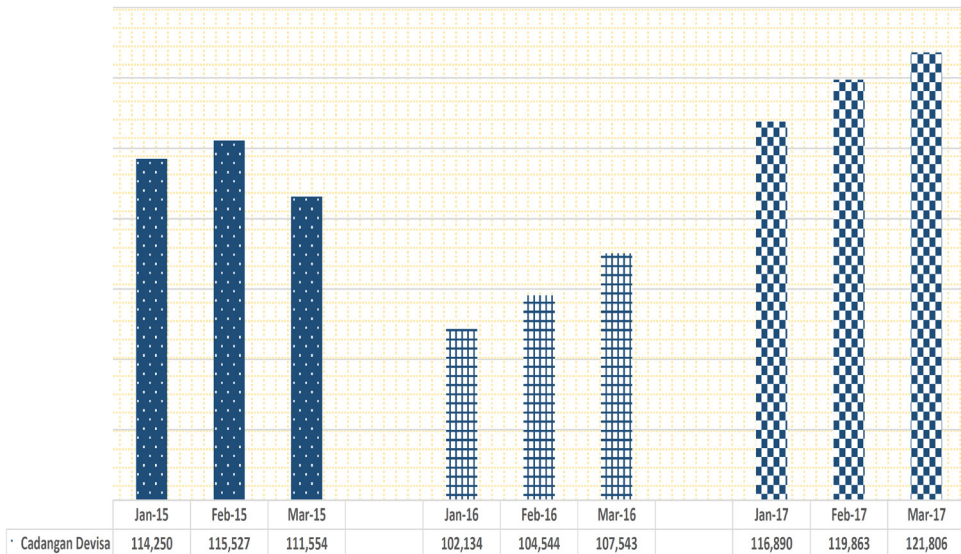
Cadangan Devisa

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2017 tercatat sebesar USD121,80 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2017 yang sebesar USD119,86 miliar. Angka ini tercatat paling tinggi dalam tiga tahun terakhir pada periode yang sama, dimana pada Maret 2015 dan Maret 2016 tercatat masing-masing USD111,56 miliar dan USD107,54 miliar.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa, antara lain berasal dari penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah, penerbitan *global bonds* Pemerintah, serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas.

Posisi cadangan devisa per akhir Maret 2017 tersebut cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

**Cadangan Devisa Indonesia
(dalam miliar USD)**



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Meningkatkan Industri Sepatu/Alas Kaki Nasional

oleh
Sony Hendra Permana*)

Perkembangan dan Potensi Industri Sepatu/Alas Kaki di Indonesia

Indonesia telah dikenal sebagai salah satu produsen sepatu/alas kaki terbesar di dunia. Saat ini Indonesia menduduki peringkat keempat dunia sebagai produsen alas kaki di bawah China, India, dan Vietnam. Pangsa pasar yang dimiliki Indonesia saat ini adalah sebesar 4,4 persen dan masih memiliki peluang untuk terus meningkatkan ekspornya. Hal ini tercermin dari nilai ekspor industri sepatu/alas kaki pada tahun 2016 yang meningkat sebesar 2,95 persen dibandingkan periode sebelumnya dengan surplus USD4,15 miliar. Selain itu juga terjadi peningkatan investasi yang sangat signifikan pada industri kulit dan produk kulit serta alas kaki, mencapai hampir empat kali lipat investasi tahun lalu, yakni sebesar Rp7,62 triliun. Khusus untuk industri sepatu/alas kaki proyeksi realisasi investasi tahun ini diperkirakan mencapai Rp3,49 triliun.

Industri sepatu/alas kaki nasional memiliki potensi untuk berkembang lebih besar seiring dengan adanya pertumbuhan mode dan juga pertumbuhan penduduk dunia. Pertumbuhan mode yang didorong oleh adanya kecenderungan anti arus utama, yakni pelanggan alas kaki tidak suka jika disamakan dengan sepatu orang lain di sekitarnya membuat

permintaan atas variasi sepatu/ alas kaki meningkat. Sementara pertumbuhan penduduk dunia secara otomatis juga akan meningkatkan kebutuhan akan sepatu/alas kaki.

Selain untuk kebutuhan ekspor, potensi pertumbuhan industri sepatu/alas kaki juga dipengaruhi oleh permintaan dalam negeri, khususnya oleh masyarakat kelas menengah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Boston Consulting Group yang disarikan oleh Chairul Tanjung pada orasi ilmiahnya, pada tahun 2012 jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 74 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat sangat besar menjadi 141 juta di tahun 2020. Dengan adanya pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang sangat signifikan ini, juga merupakan pasar potensial yang dapat dikembangkan oleh industri sepatu/ alas kaki nasional.

Namun demikian besarnya potensi industri sepatu/alas kaki nasional untuk berkembang belum diiringi dengan perkembangan sektor hulu industri ini. Industri sepatu/alas kaki masih memiliki permasalahan yang mendasar yakni sebagian besar bahan baku, bahan penolong dan aksesoris industri sepatu/alas kaki masih harus diimpor. Saat ini, kebutuhan bahan baku untuk industri kulit, sepatu/ alas kaki hanya dapat dipenuhi dari

*) Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan DPR RI.
e-mail: sony_hendra@yahoo.com

dalam negeri sebesar 36 persen dari kapasitas industri penyamakan nasional. Jika kebutuhan bahan baku tersebut dapat dilakukan substitusi impor dan dipenuhi dari dalam negeri, maka akan meningkatkan nilai ekonomi industri sepatu/alas kaki. Saat ini nilai ekonomi di industri kulit, barang dari kulit, dan sepatu/alas kaki berkisar Rp35 triliun dengan impor Rp15 triliun. Dengan demikian masih ada kesempatan untuk meningkatkan nilai ekonomi industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki melalui substitusi impor.

Dukungan Kebijakan Pemerintah

Kelompok industri kulit, sepatu/alas kaki dan aneka merupakan salah satu industri yang strategis sebagai penghasil devisa negara. Industri ini telah memberikan kontribusi terhadap nilai ekspor sebesar USD12,28 miliar atau setara 8,17 persen dari total ekspor nasional di tahun 2015. Kelompok industri ini juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,1 juta orang. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan kelompok industri ini, khususnya pada industri sepatu dan alas kaki maka diperlukan adanya suatu kebijakan pemerintah yang mendukung baik dari sektor hulu maupun hilir.

a. Kebijakan Sisi Hulu

Pada sisi hulu, kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada ketersediaan bahan baku, bahan penolong, dan aksesoris industri. Kebijakan yang perlu dilakukan perbaikan salah satunya adalah tata niaga impor dan peraturan ekspor untuk kulit mentah sebagai bahan baku industri kulit. Industri kulit, sepatu/alas kaki, dan aneka merupakan industri yang saling terkait. Hasil produksi

industri penyamakan kulit digunakan sebagai bahan baku industri sepatu/alas kaki dan industri barang dari kulit lainnya seperti dompet, tas, koper, dan lain-lain. Namun demikian, bahan baku industri penyamakan kulit yang berupa kulit hewan masih mengalami permasalahan kontinuitas pasokan baik dari dalam negeri maupun impor.

Saat ini kebutuhan kulit sapi untuk industri di Indonesia mencapai 20 juta lembar kulit sapi per tahun. Sementara itu pasokan dari dalam negeri hanya sebanyak 5 juta ekor sapi per tahun. Dengan demikian kebutuhan bahan baku yang dapat dipenuhi dari dalam negeri hanya sebesar 35 persen sehingga pasokan bahan baku kulit perlu dipenuhi dari impor. Namun demikian, adanya aturan yang sangat ketat terkait kebijakan karantina sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1997 tentang Karantina Bahan Baku Kulit, menyebabkan pelaku industri penyamakan kulit kesulitan untuk mendapatkan bahan baku melalui impor. Impor kulit hanya diperbolehkan dari negara yang terbebas dari penyakit mulut dan kuku sehingga harganya sangat mahal dan harga produk hasil olahan industri kulit ikut mahal. Bandingkan dengan negara-negara pesaing yang dapat mengimpor bahan baku dari seluruh dunia kemudian hasil olahannya diekspor ke Indonesia. Hal ini menjadi mengurangi daya saing produk hasil olahan industri kulit domestik. Di sisi lain, Indonesia juga masih melakukan ekspor kulit mentah ke negara lain sementara pasokan dari dalam negeri masih kurang. Sepanjang tahun 2013 saja ekspor kulit sapi mencapai 1,1 juta lembar, kulit kambing 500 ribu lembar, dan kulit domba 450 ribu lembar.

Kesulitan bahan baku pada industri penyamakan kulit ini pada akhirnya sangat berpengaruh pada penyediaan bahan baku untuk industri sepatu/alas kaki, sehingga akhirnya kekurangan penyediaan bahan baku domestik harus dipenuhi dengan impor.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan-kebijakan yang berpihak pada industri kulit, sepatu/alas kaki, dan aneka lainnya. Kebijakan yang diperlukan dapat berupa pemberian kemudahan impor kulit dari seluruh negara dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Selain itu juga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menaikkan bea keluar ekspor untuk kulit sebagaimana saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2016. Dengan adanya kenaikan bea keluar ekspor kulit mentah diharapkan pengusaha kulit domestik dapat menyalurkan hasilnya ke industri dalam negeri. Dengan demikian ketergantungan bahan baku terhadap impor, khususnya industri sepatu dan alas kaki dapat dikurangi.

b. Kebijakan Sisi Hilir

Pada sisi hilir, kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada akses pemasaran produk sepatu/alas kaki di luar negeri. Pemerintah perlu mendorong implementasi perjanjian perdagangan bebas, khususnya di negara-negara di kawasan Eropa, agar produk hasil industri sepatu dan alas kaki memiliki daya saing di pasar tersebut. Saat ini Indonesia masih dikenai tarif masuk sebesar 11 persen untuk produk sepatu dan alas kaki ke pasar Eropa, sementara produk dari negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh masih belum dikenakan

tarif karena kedua negara tersebut dianggap negara yang underdeveloped di pasar Eropa, sehingga produk kedua negara tersebut menjadi lebih murah. Selain itu juga, pemerintah perlu memperluas pangsa pasar dengan membuka akses kerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Strategi Pengembangan Usaha

Dukungan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa adanya upaya pengembangan usaha oleh pelaku industri. Untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan oleh pelaku usaha untuk pengembangan usahanya. Namun demikian yang saat ini yang pertama sekali perlu dilakukan adalah difokuskan pada pengembangan SDM dan membangun merek dagang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk perluasan pangsa pasar.

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Industri sepatu/alas kaki merupakan salah satu industri yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Pada tahun 2016 lalu, industri sepatu/alas kaki mampu menyerap tenaga kerja langsung sekitar 750 ribu orang. Di tahun 2017 ini diperkirakan industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja baru lebih dari 30 ribu orang. Penyerapan jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang cukup besar ini juga harus diiringi oleh peningkatan kemampuan SDM dalam proses produksi. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk sepatu/alas kaki Indonesia. Pada akhirnya juga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia, khususnya produk alas kaki.

Selama ini pekerja Indonesia telah diakui lebih rajin sehingga banyak pemilik merek sepatu dunia menjadikan Indonesia sebagai tempat berproduksi. Namun demikian, Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal jumlah SDM industri yang memiliki kompetensi, khususnya teknisi instalasi mesin dan tenaga ahli produksi. Untuk itu pelaku usaha juga dituntut untuk memberikan pelatihan terhadap SDM terampilnya untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui kursus maupun magang pada perusahaan yang memiliki teknologi yang lebih tinggi. Sementara itu, Pemerintah juga dapat membangun pendidikan vokasional yang berbasis industri untuk menyiapkan SDM-SDM yang siap terjun ke dunia kerja, khususnya industri sepatu/ alas kaki. Dengan pendidikan vokasional diharapkan dapat tercipta SDM-SDM yang tidak hanya mengetahui ilmu pengetahuan secara teori namun juga mendapatkan keterampilan khusus dari ilmu pengetahuan tersebut.

b. Membangun Merek Dagang

Selama ini banyak dari merek-merek sepatu/ alas kaki ternama dari luar negeri yang membangun industrinya di Indonesia. Namun demikian hanya sedikit saja merek-merek dari dalam negeri yang dikenal masyarakat. Merek dari dalam negeri ini umumnya diproduksi oleh industri kecil dan menengah (IKM) sehingga tidak begitu dikenal di pasar internasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi industri sepatu/ alas kaki nasional, sekaligus penguatan penguatan *branding* produk dalam negeri diperlukan promosi merek-merek dagang produk lokal di pasar dunia. Pengembangan

merek dagang produk Indonesia juga diyakini sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan industri sepatu/ alas kaki di Indonesia.

Pengenalan merek dagang nasional dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melakukan pengenalan produk maupun pemasarannya. Seiring dengan kemajuan *electronic commerce* (*e-commerce*), pelaku usaha, khususnya IKM, dapat langsung mengenalkan dan memasarkan produknya ke seluruh dunia selama memiliki koneksi internet. Di lain pihak pemerintah juga dapat melakukan pengenalan produk-produk dalam negeri dengan membawa produk-produk lokal ke pameran-pameran internasional. Salah satu contoh adalah produk sepatu merek Ekuator yang sedang dikembangkan di Indonesia, saat ini sudah mulai banyak dibicarakan dan direspon di 12 negara di dunia. Dengan semakin kuatnya merek dagang tersebut ke berbagai belahan dunia secara langsung akan juga meningkatkan permintaan akan produk tersebut dan pada akhirnya akan menggerakkan industri sepatu/ alas kaki.

Daftar Pustaka

Bisnis.com. (2017). Bisnis Bisnis Kulit & Alas Kaki Makin Moncer. Dikses dari <http://industri.bisnis.com/>Tanggal akses 22 April 2017

CNN Indonesia. (2016). Ekspor Kulit Ditentang, Menperin Minta Bea Keluar Dinaikkan. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/>. Tanggal akses 23 April 2017

Sindonews.com.(2017). Indonesia Peringkat 4 Produsen Terbesar Alas Kaki. Diakses dari <https://ekbis>.

sindonews.com. Tanggal akses 21 April 2017

Kementerian Perindustrian RI. (2017). Industri Kulit Minta Kelonggaran Impor. Diakses dari <http://www.kemenperin.go.id>. Tanggal akses 22 April 2017

Kompas.com. (2016). Kemenperin Dorong Kinerja Industri Kulit dan Alas Kaki. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com>. Tanggal akses 22 April 2017)

Kompas. (20 April 2017). Mode

Mendorong Industri Alas Kaki. Hal 18.

Bisnis.com. (2014). Pasokan Domestik Sulit, Industri Minta Ekspor Kulit Disetop. Diakses dari <http://industri.bisnis.com>. Tanggal akses 2 Mei 2017

Aprisindo. (2017). Temu Usaha Industri Aneka, Alas Kaki dan Kulit Bersama Menkeu dan Menperin. Diakses dari <http://www.aprisindo.or.id>. Tanggal akses 24 April 2017

Simpulan

Perkembangan industri sepatu/alas kaki nasional yang cukup besar pada tahun lalu merupakan momentum untuk mengembangkan kembali industri ini sebagai salah satu industri prioritas dalam perekonomian Indonesia. Namun demikian permasalahan pada industri ini masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dari sisi hulu, pemerintah harus membuat kebijakan yang memberikan dukungan dalam penyediaan bahan baku, bahan penolong, dan aksesoris bagi industri ini. Kelonggaran dalam melakukan impor bahan baku kulit perlu dilakukan namun tetap memperhatikan faktor kesehatan dan keamanan. Selain itu juga perlu mempertimbangkan adanya kenaikan bea keluar kulit mentah, agar pasokan bahan baku bagi industri khususnya sepatu/alas kaki tidak terlalu bergantung pada impor. Di sisi hilir pemerintah harus memperluas akses pasar melalui kerjasama dengan negara tujuan baru yakni kawasan Timur Tengah dan Afrika. Selain itu juga pemerintah perlu mendorong percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas, khususnya di kawasan Eropa agar produk hasil industri sepatu/alas kaki tidak lagi dikenai tarif masuk.

Dalam rangka pengembangan industri sepatu/alas kaki, pelaku usaha dan pemerintah perlu melakukan berbagai usaha dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan membangun merek dagang lokal. Pelaku usaha perlu meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan SDMnya dalam berbagai program pelatihan ataupun magang. Pelaku usaha, industri sepatu/ alas kaki, khususnya pelaku IKM juga perlu memperkenalkan produknya ke pasar internasional agar dapat memperluas pasarnya sehingga permintaan akan produknya meningkat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi baik untuk pengenalan produk maupun pemasarannya. Sementara itu pemerintah juga perlu membangun pendidikan vokasional berbasis industri agar kebutuhan SDM industri yang telah memiliki keterampilan tersedia. Dalam rangka penguatan merek dagang, pemerintah dapat mengikutsertakan merek dagang dalam negeri dalam berbagai kegiatan pameran internasional agar produk-produk tersebut dikenal luas di pasar dunia.

Permasalahan Urbanisasi di Indonesia

Martha Carolina *)

Abstrak

Pertumbuhan Urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 60 persen pada tahun 2025 hal ini menunjukkan bahwa penduduk perkotaan di proyeksikan melampaui jumlah perdesaan. Salah satu faktor pendorong meningkatnya urbanisasi yaitu kesempatan kerja di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain terjadinya disparitas jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan, dampak urbanisasi juga mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah bagi masyarakat dipertkotaan dan menyebabkan pengangguran antar perkotaan dengan perdesaan di bagian barat khususnya Pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan bagian timur. Untuk itu perlu upaya Pemerintah dalam mengelola urbanisasi dengan bijak, antara lain mengatasi kemiskinan dengan membangun Perdesaan secara terpadu, menyederhanakan izin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuat skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, penciptaan kesempatan kerja dan perencanaan ketenagakerjaan, serta sinergi antara tingkat pemerintahan, baik tingkat perkotaan, daerah, maupun pusat.

Urbanisasi menurut J.H. De Goode diartikan sebagai proses pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan *urban* ataupun proses transformasi suatu wilayah berkarakter perdesaan (*rural*) menjadi urban. Urbanisasi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pertumbuhan penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan.

Tingkat urbanisasi Indonesia diproyeksikan sudah mencapai 60 persen pada tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa penduduk perkotaan diproyeksikan melampaui jumlah perdesaan. Untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Pulau Jawa pada tahun

2035 sudah di atas 80 persen, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten.

Pertumbuhan urbanisasi di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan India sebesar 3,1 persen, China sebesar 3,8 persen dan Negara Asia Lainnya. Indonesia hanya memperoleh manfaat dari urbanisasi sebesar 4 persen pertumbuhan PDB untuk setiap 1 persen pertumbuhan urbanisasi. Negara-negara lain memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi akibat urbanisasi yaitu bertambahnya pekerjaan formal dan meningkatnya produktivitas. Setiap 1 persen pertumbuhan urbanisasi berkorelasi dengan peningkatan PDB per kapita sebesar 13 persen untuk Negara India, sebesar 10 persen untuk Tiongkok, dan 7 persen untuk Thailand (World Bank. 2016).

¹ Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail:tha_caroline03@yahoo.com

Kesempatan Kerja Menjadi Faktor Pendorong Urbanisasi

Berdasarkan tabel 1, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja tahun 2014 di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan sebesar 5,1 persen. Dan hal ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya urbanisasi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang diiringi dengan keinginan mencari kesempatan kerja di kota, sehingga secara langsung dapat mempengaruhi pendapatan bagi para urban tersebut.

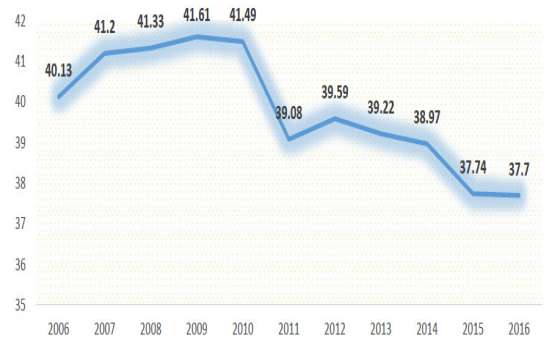
Tabel 1. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (%)

Daerah	2011	2012	2013	2014
Perkotaan	64,68	67,19	65,9	65,5
Perdesaan	58,97	60,1	59,5	59,8
Total	61,79	63,61	62,66	62,64

Sumber: BPS, Diolah

Penyebaran kesempatan bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja tahun 2016 didominasi oleh sektor pertanian, yakni sebesar 37,77 juta jiwa (gambar 1). Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap kesempatan kerja di Indonesia walaupun jumlahnya semakin mengecil. Urbanisasi membawa dampak masyarakat agraris di perdesaan berangsur meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan, baik di sektor formal maupun non-formal. Selain itu, generasi muda yang relatif lebih berpendidikan, tidak tertarik untuk bekerja sebagai petani, karena sektor pertanian dipandang tidak memberi harapan masa depan yang lebih baik, sehingga identik dengan kemiskinan.

Gambar 1. Penduduk bekerja di Sektor Pertanian (juta/jiwa)



Sumber: BPS, Diolah

Akibat yang Ditimbulkan dari Urbanisasi

Akibat Pertumbuhan urbanisasi yang tinggi telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan, masalah penyediaan rumah layak huni, dan pengangguran.

1. Kemiskinan

Urbanisasi berkaitan dengan masalah demografis juga mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap proses pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya menimbulkan kemiskinan terhadap mereka yang kalah bersaing dengan yang lainnya. Disparitas jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan disebabkan oleh semakin berkurangnya pertumbuhan ekonomi di daerah akibat otonomi daerah belum mampu menggerakkan pembangunan di desa dan semakin tingginya pembangunan di kota. Pembangunan ekonomi yang bias ke arah perkotaan (*urban oriented*) mendorong banyaknya sumber daya manusia, terutama generasi muda

yang semula bermukim di perdesaan, berpindah ke perkotaan. Berdasarkan tabel 2 terjadi disparitas Jumlah penduduk miskin di Kota dan di desa. Jumlah penduduk miskin di kota sebesar 10,48 juta jiwa (7,73 persen) sedangkan jumlah penduduk miskin di desa sebesar 17,27 juta jiwa (13,96 persen).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010-2015 (dalam Juta Jiwa)

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2010	11,1	19,93	31,02
2011	11,0	18,96	29,96
2012	10,58	18,29	28,86
2013	10,63	17,74	28,07
2014	10,35	17,37	27,72
2015	10,61	17,89	28,51
2016	10,48	17,27	27,76

Sumber: BPS, Diolah

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar dari jumlah dan persentase penduduk miskin namun tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Tren Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2010-2016 mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) tahun 2016 untuk kota sebesar 1,21 persen mengalami penurunan sebesar 0,36 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 1,57 persen. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk desa tahun 2016 sebesar 2,32 persen mengalami penurunan sebesar 0,48 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 2,8 persen (tabel 2). Tren Indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2010-2016 mengalami penurunan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2016 untuk kota sebesar 0,29 persen mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan

tahun 2010 sebesar 0,4 persen. Indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk desa tahun 2016 sebesar 0,59 persen mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 0,75 persen (tabel 3). Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan terlihat bahwa kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin di perdesaan dengan garis kemiskinan perdesaan jauh lebih lebar daripada di daerah perkotaan, sementara berdasarkan Indeks keparahan kemiskinan (P2), menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi daripada masyarakat miskin perkotaan.

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 (%)

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2010	1,57	2,8	2,21
2011	1,52	2,69	2,08
2012	1,4	2,96	1,88
2013	1,41	2,97	1,89
2014	1,25	2,25	1,75
2015	1,29	2,4	1,84
2016	1,21	2,32	1,74

Sumber: BPS, Diolah

Tabel 4. Indeks Keparahhan Kemiskinan P2 (%)

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2010	0,4	0,75	0,58
2011	0,99	0,7	0,55
2012	0,96	0,59	0,47
2013	0,97	0,6	0,48
2014	0,91	0,57	0,44
2015	0,95	0,67	0,51
2016	0,29	0,59	0,44

Sumber: BPS, Diolah

Indeks keparahan kemiskinan Kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di desa semakin meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) makin sempitnya penguasaan lahan pertanian akibat alih fungsi dan fragmentasi lahan, (2) rendahnya produktivitas akibat degradasi kesuburan lahan, (3) tekanan jumlah penduduk, (4) kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani (Swastika, 2010). Konversi lahan yang tidak dapat dibendung dan fragmentasi lahan karena sistem pewarisan menjadikan luas usaha tani makin sempit. Akibatnya petani yang sudah gurem menjadi makin gurem, bahkan banyak diantaranya yang hanya menjadi buruh tani. Menurut Yudohusodo, (2004) bahwa penyempitan lahan pertanian merupakan penyebab utama miskinnya petani. Suatu studi tahun 2006 menunjukkan bahwa pendapatan usaha tani padi sebesar Rp9,40 juta/ha/tahun Namun, dengan luas garapan yang hanya 0,3 ha, maka pendapatan petani padi hanya Rp2,82 juta/KK/tahun atau rata-rata Rp58.750/kapita/bulan (Sudaryanto et al. 2006).

Urbanisasi juga telah memunculkan masalah kemiskinan di perkotaan sebagai akibat urbanis yang tidak memiliki pendidikan yang cukup. Pendidikan di desa cenderung rendah kualitasnya yang akibatnya para urbanis ini akhirnya jatuh miskin di kota-kota karena mereka tidak mampu bersaing.

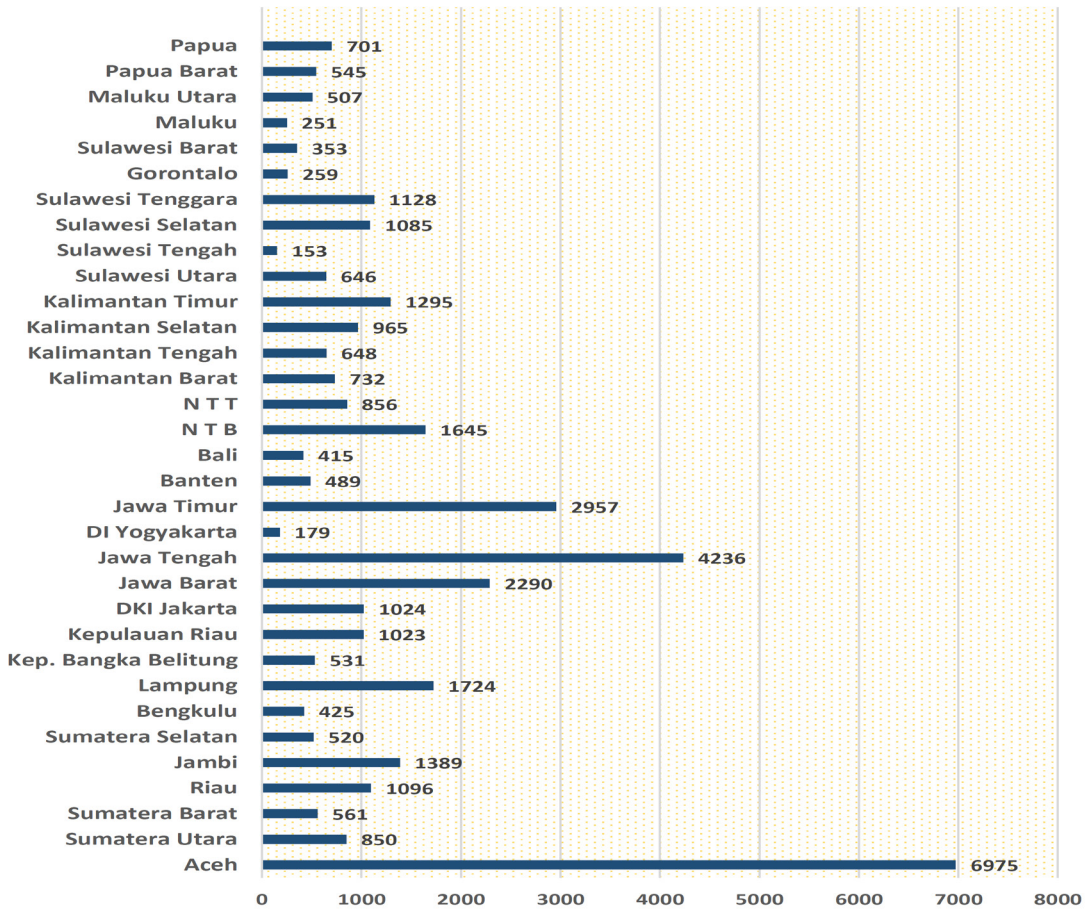
2. Kebutuhan Rumah

Tingginya tingkat urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan

mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Urbanisasi per tahun diperkirakan meningkat sekitar 3,5 persen . Permintaan rumah semakin tinggi sedangkan lahan atau tanah yang tersedia tidak bertambah. Harga tanah di perkotaan mulai triwulan IV tahun 2011 sampai triwulan I tahun 2016 naik rata-rata 18 persen setiap tahun (Kompas 2017). Kebutuhan perumahan di Indonesia saat ini berdasarkan RPJMN 2015-2019 sebesar 850 ribu rumah dengan penyediaan hunian layak (sewa/milik) 2.200.000 rumah tangga melalui anggaran pemerintah dan 2.200.000 rumah tangga melalui kontribusi non pemerintah yang dipenuhi melalui kontribusi non pemerintah (BUMN/ BUMD, swasta dan masyarakat). Angka kekurangan rumah sulit turun karena 60 persennya ada pada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal. Masyarakat urbanisasi rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga mempunyai masalah terhadap akses perbankan karena dianggap tidak memenuhi kriteria perbankan.

Urbanisasi membawa permasalahan besar terhadap penyediaan rumah layak huni, kebijakan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya dirancang untuk mengantisipasi laju pertumbuhan hunian, terutama kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, banyak ruang terbuka milik pemerintah yang beralih fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL), tempat parkir, dan permukiman kumuh perkotaan. Luas lahan permukiman kumuh perkotaan yang

Gambar 2. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Ha)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

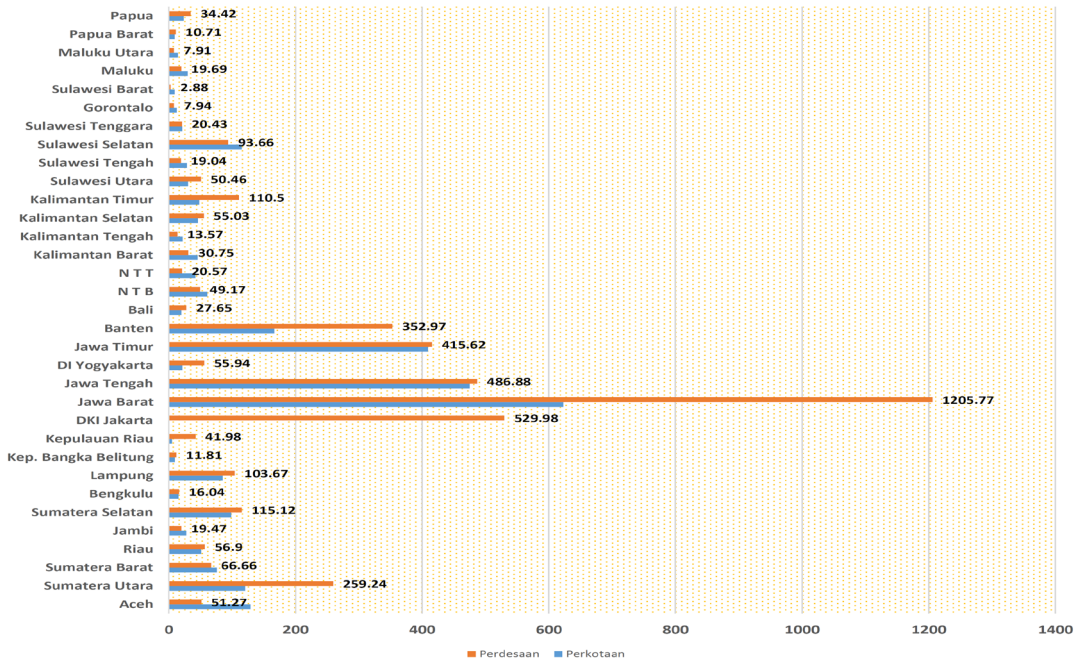
ada diseluruh Indonesia sebesar 38.431 Ha yang terdiri dari 23.473 Ha berada di wilayah perkotaan dan 11.957 Ha di wilayah perdesaan.

3. Pengangguran

Dampak urbanisasi menyebabkan pengangguran antara perdesaan dengan perkotaan di Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan di Indonesia bagian timur. Jumlah penganggur terbesar per provinsi terbesar berada di Jawa Barat hal ini bukan disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat atau angkatan tenaga kerja yang berada di provinsi ini adalah yang terburuk

di Indonesia melainkan disebabkan jumlah penduduk yang begitu banyak di Jawa Barat (sebagian besar dari jumlah penduduk di Indonesia berada di Jawa) sedangkan lapangan kerja yang tersedia di Jawa Barat tidak mampu mengimbangi suplai tenaga kerja yang bertambah setiap tahunnya. Provinsi Jumlah pengangguran di Jawa Barat di perkotaan sebesar 623,22 ribu orang sedangkan di perdesaan sebesar 1.205,77 ribu orang. di Pulau Jawa pengangguran per provinsi di perkotaan dan pedesaan tidak merata.

Gambar 3. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Ha)



Sumber: BPS, Diolah

Rekomendasi

Urbanisasi yang disebabkan oleh tingkat kesenjangan antara kota dan desa perlu dikelola dengan bijak, antara lain (a) perlunya upaya Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sebagai dampak urbanisasi dengan membangun Perdesaan secara terpadu, mulai dari rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian, reorientasi industri berbasis pertanian dari perkotaan ke perdesaan, sampai pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat desa. Industri hulu dan hilir berbasis pertanian perlu direorientasi dari perkotaan ke perdesaan; (b) Pemerintah juga harus melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang layak sebagai dampak urbanisasi dengan menyederhanakan izin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuat skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal; (c) Pemerintah harus melakukan upaya penciptaan kesempatan kerja dan perencanaan ketenagakerjaan yaitu penciptaan lapangan kerja alternatif baik pekerjaan tetap maupun sementara harus direncanakan dengan matang. Perencanaan tenaga kerja penting supaya tidak terjadi penumpukan di kota-kota besar. Perkotaan mulai memperketat diri untuk tidak memudahkan orang pengangguran numpuk di kota-kota dengan operasi yustisi. Pemerintah juga perlu program-program untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan perluasan kesempatan kerja baik untuk tenaga kerja sektor informal maupun sektor formal; (d) serta adanya sinergitas antara berbagai tingkat pemerintahan, baik tingkat perkotaan, daerah, maupun pusat.

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPS, dan United Nation Population Fund. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2014). Kebutuhan data tenaga ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia.

_____. (2016). Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986 – 2016. Indonesia.

_____. (2016). Jumlah penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013-2016. Indonesia.

_____. (2016). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi tahun 2016. Indonesia.

_____. (2016). Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi tahun 2016. Indonesia.

_____. (2016). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986-2016. Indonesia.

Goede, de, J.H. (1980). Urbanisasi dan Urbanisme. Modernisasi Pengantar Sosialisasi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang (Schoor), Jakarta: Gramedia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kisah Urbanisasi. Diakses Kembali dari http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11675. Diakses tanggal 27 April 2017.

Kementerian PPN/Bappenas. Penyediaan Hunian Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Indonesia.

Kompas. (2017). Akses Untuk Pekerja Informal di Permudah. Diakses kembali dari <https://www.pressreader.com>. diakses tanggal 30 April 2017

Sudaryanto, T., D.K.S. Swastika, B. Sayaka, and S. Bahri. (2006). Financial And Economic Profitability of Rice Farming Across Production Environments in Indonesia. Proceeding of International Rice Congress on Science, Technology, and Trade for Peace and Prosperity, at National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi, India. Oct 2006. Published by International Rice Research Institute (IRRI), Los Baños, The Philippines.

Swastika, D.K.S. (2005). Historical Profile of Poverty Alleviation in Indonesia. Short Article. CGPRT-Flash. Vol.3. No.6 June 2005. ISSN.1693-4636. UN-ESCAP. Bogor

Tambunan, Tulus (2016). Pembangunan Ekonomi Inklusif. Jakarta: LP3ES

Yudohusodo, S. (2004). Pembaharuan UU Agraria Paling Ampuh Tingkatkan Kesejahteraan Petani. Tempo Interaktif Selasa, 24 Agustus 2004.

Worldbank. (2016). Diakses Kembali dari <http://www.ilo.org>. Diakses tanggal 25 April 2017.

Worldbank. (2016). Kisah Urbanisasi. Diakses Kembali dari <http://www.worldbank.org>.diakses tanggal 26 April 2017.



Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id



9 772502 868006